

**MODAL SOSIAL
KAJIAN TENTANG TATA KELOLA PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA MELALUI *GEMOHING* DI
KECAMATAN WITIHAMA - KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Frans Bapa Tokan
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
frans.fisipunwira@gmail.com**

ABSTRACT

The phenomenon of the collapse of social capital, such as the tradition of mutual cooperation and self-sufficient or by the villagers in the district called Gemohing Witihamas increasingly felt in the social life of the village, amid strong grip of modernization and globalization. Social capital as collective power of rural communities that have long been rooted in people's lives, is actually the ancestral cultural heritage in managing the important pillars of social cohesion and community development should be a castle guard of civilization. Therefore the main issue to be examined is how the tradition of gemohing highlighted from the perspective of social capital in support of rural development. This study is expected to more comprehensively describe the key role assumed by gemohing as social capital in supporting the process of rural development. The study results demonstrate that social capital has been the collective strength of the governance of rural development increasingly shifted due to the presence of new social institutions formed by the State and a number of policies that it has ignored the main role of gemohing. Despite this collective power that can still be presented again given the still dominant cultural traditions and kinship ties are still inherent in social life, especially in the face of socio-cultural events as well as cooperation for the benefit of rural development. Thus concluded that gemohing can still be used as the basis of social energy boosters that are beneficial for development and also an antidote to the negative effects of globalization. Hence a number of important aspects of gemohing as social capital such as trust, social networks and collective action remains a core strength togetherness strengthen and reinforce cooperation in order to garner a solid face various problems and challenges of rural development. That means gemohing must be preserved and treated as an integrating force for the development of society in all its aspects. And therefore should be given a proper place by the village government in all dimensions of development.

Keywords: Social Capital , Gemohing and Rural Community Development

ABSTRAK

Fenomena runtuhnya modal sosial masyarakat, seperti tradisi bergotong royong dan berswadaya atau oleh masyarakat desa di Kecamatan Witihamas disebut *Gemohing* kian terasa dalam kehidupan sosial desa, di tengah kuatnya

cengkaman modernisasi dan globalisasi. Modal sosial sebagai kekuatan kolektif masyarakat desa yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat, sejatinya merupakan warisan budaya leluhur dalam mengelola kohesi sosial dan pilar penting pembangunan masyarakat yang mestinya menjadi benteng penjaga peradaban. Karena itu persoalan utama yang hendak dikaji adalah bagaimanakah tradisi *gemohing* disorot dari sudut pandang modal sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat desa. Kajian ini diharapkan mendeskripsikan secara lebih komprehensif peran kunci yang diemban oleh *gemohing* sebagai modal sosial dalam mendukung proses pembangunan masyarakat desa. Hasil kajian membuktikan bahwa modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan kolektif bagi tata kelola pembangunan masyarakat desa kian mengalami pergeseran akibat hadirnya lembaga-lembaga sosial baru bentukan Negara dan sejumlah kebijakannya yang justru telah mengabaikan peran utama dari *gemohing*. Meskipun demikian kekuatan kolektif itu masih dapat dihadirkan kembali mengingat masih dominannya tradisi kultural dan ikatan kekerabatan yang masih melekat dalam kehidupan sosial terutama dalam menghadapi peristiwa sosial budaya maupun kerjasama untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa. Dengan demikian disimpulkan bahwa *gemohing* masih dapat dijadikan sebagai basis penguat energi sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan dan sekaligus penangkal eksekusi negatif dari globalisasi. Karena itu sejumlah aspek penting dari *gemohing* sebagai modal sosial seperti kepercayaan, jaringan sosial dan tindakan kolektif masih tetap menjadi kekuatan inti memperlengkapi dan memperteguh kebersamaan guna menggalang kerjasama yang solid menghadapi berbagai problem dan tantangan pembangunan desa. Itu berarti *gemohing* harus dijaga dan dirawat sebagai kekuatan pengintegrasian masyarakat untuk pembangunan di segala aspeknya. Dan karena itu harus diberi tempat semestinya oleh pemerintah desa dalam seluruh dimensi pembangunan.

Kata-kata Kunci : Modal Sosial, *Gemohing* dan Pembangunan Masyarakat Desa

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya kolektif yang bertumpu pada kebersamaan warga di level lokal sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum *nation state* terbentuk di negeri ini. Karena itu oleh banyak pihak dipandang sebagai modal sosial dan bagian penting dari strategi pembangunan yang efektif dan penguatan jaring pengaman sosial masyarakat. Meskipun dalam kenyataan modal sosial itu mulai mengalami disfungsi dan ditinggalkan masyarakat seiring dengan hadirnya nilai-nilai baru. Bahkan yang terjadi kemudian adalah

makin melemahnya kekuatan kolektif itu dalam menghadapi beragam problem sosial yang hadir silih berganti di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Fukuyama, (2002) modal sosial sebenarnya telah mengalami kehancuran besar di Amerika Serikat dan Eropa sejak tahun 1960-an, dimana angka kejahatan meningkat, hancurnya tatanan keluarga dan telah hilangnya kepercayaan. Sedangkan di Indonesia dibuktikan dengan adanya praktek KKN yang sepertinya telah menjadi budaya di kalangan para pejabat dan aparat di hampir semua level birokrasi pemerintah. Bukan hanya itu, konflik horizontal antar warga masyarakat pun justru merebak di sejumlah daerah dan desa yang tentunya telah berimplikasi luas pada hilangnya semangat dalam membangun kohesivitas sosial menghadapi beragam krisis sosial dan pembangunan. Problem sosial ini tampaknya masih terus berlanjut karena gagalnya negara memberi solusi atas beragam persoalan itu secara lebih tepat dan adil. Apabila dicermati secara saksama gagasan Toffler dalam Giddens (1999) tentang *global culture*, maka betapa menakutkan kebudayaan dunia dewasa ini, karena kehadiran globalisasi tanpa disadari telah menggerogoti hampir seluruh nafas kehidupan kita. Namun tidak berarti bahwa dampak globalisasi itu dapat menggerogoti semua peradaban manusia ke arah negatif.

Interaksi dan persentuhan kebudayaan antara budaya global, domestik dan lokal secara timbal balik dan intensif akan mampu melahirkan peradaban baru yang lebih akomodatif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Hal itu akan terjadi ketika ada pertukaran dan toleransi budaya sedemikian rupa sehingga mampu mensinergikan dua atau lebih kekuatan tersebut menjadi satu kekuatan dasyat untuk mendorong perubahan sosial dan pembangunan yang diharapkan

bisa saling memberi keuntungan. Tetapi harus diingat bahwa hal itu akan terjadi ketika kearifan lokal sebagai modal sosial masih memiliki energi mengintegrasikan warga lokalnya serta mampu mengkontekstualisasikan nilai-nilai global dalam kehidupan masyarakat. Dan di titik inilah sebenarnya peran institusi pemerintah dibutuhkan guna memainkan fungsi strategisnya sebagai akomodator dan fasilitator yang efektif untuk mensinergikan kekuatan-kekuatan itu. Sehingga kebudayaan global tidak sampai menghilangkan kekayaan lokal yang menjadi modal sosial dan identitas masyarakatnya.

Tampaknya modal sosial masyarakat desa dewasa ini yang menjadi basis ideologis bagi tindakan kolektif warga desa makin mengalami kemerosotan karena peran dan fungsinya mulai tereduksi ketika hadirnya pranata-pranata sosial baru bentukan negara, seperti Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lain sebagainya. Karena itu pemahaman *gemohing* sebagai konsep modal sosial bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat sesungguhnya telah terabaikan, sehingga dibutuhkan pemikiran ulang dalam pengembangannya sesuai tuntutan perubahan masyarakat. Dengan demikian kajian yang lebih dalam dan komprehensif tentang nilai-nilai *gemohing* sebagai modal sosial setidaknya dapat digali kembali agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang betapa kaya dan kuatnya mekanisme sosial budaya yang dimiliki suatu masyarakat di masa lalu dalam mengatasi berbagai problem sosialnya.

Dewasa ini masyarakat desa seakan tak berdaya ketika ditimpa musibah atau krisis sosial seperti kemiskinan, rawan pangan, busung lapar, bencana alam maupun konflik sosial. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan skema

teknokratis melalui bantuan sosial dari pihak luar yang diberikan oleh negara (baca: pemerintah) dan elemen sosial lain dengan sejumlah pendekatan program dan kegiatan yang pada kenyataannya lebih sering menyimpan masalah sesudah program berakhir, seperti KKN, konflik sosial dan lain sebagainya, yang kemudian menambah renggangnya ikatan hubungan sosial di antara anggota masyarakat satu dengan lainnya. Karena itu bantuan seperti ini justru cenderung membuat masyarakat bukan makin mandiri secara sosial ekonomi melainkan dapat meruntuhkan spirit kemandirian dan menciptakan ketergantungan permanen pada bantuan itu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah *gemohing* masih dipandang sebagai kekuatan penopang kehidupan sosial dalam menghadapi kekuatan negatif dari luar yang selalu hadir berbarengan dengan pesatnya modernisasi pembangunan dewasa ini.

Dalam kaitan dengan pertanyaan di atas Friedmann dalam Soetomo (2008:409) mencoba memberikan jalan keluar bahwa dalam memahami masalah sosial seperti kemiskinan dan lain-lainnya justru berawal dari kurangnya kekuatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat miskin dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada sejumlah dasar kekuatan sosial yang berperan dalam mengembangkan kehidupan, antara lain pengetahuan dan skill, informasi yang layak, organisasi sosial formal maupun informal, jaringan sosial, sumber keuangan dan lain sebagainya. Sebab itu pemecahan masalah sosial mestinya bertumpu pada dasar kekuatan sosial itu agar dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan adil. Itu berarti pranata-pranata sosial atau tradisi komunitas yang tumbuh dan berkembang di desa seperti *Gemohing* harusnya dijaga, dirawat dan diadaptasikan sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada penguatan

kapasitas modal sosial masyarakat, tanpa harus menggantikannya dengan entitas baru yang justru dapat menambah masalah dan mengasingkan warga masyarakat dari akar kehidupannya.

Bertolak dari hasil penelitian di sebuah desa yang telah dilakukan terkait tradisi membangun kebersamaan atau yang disebut dengan *Gemohing* oleh masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya sebagai basis modal sosial yang strategis untuk pembangunan. Karena itu kajian ini setidaknya akan difokuskan pada aspek-aspek penting dari pengelolaan *Gemohing* sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat desa serta mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab runtuhnya kekuatan kolektif masyarakat di level lokal.

Analisis mengenai institusi sosial sebagai modal sosial dalam mengelola sumber-sumber daya kolektif di level lokal, antara lain dapat dicermati dari tulisan Munsir Lampe, 1996, Kissya, 1993, Beckman et al, 1995, Admadja, 1993, Suhardi, 1996; Michon & de Foresta, 1994; Tjitradjaja, 1994; Juhadi, 1995; Fikarwin, 1996 yang dikutip Lubis (2002), telah memperlihatkan bahwa setiap komunitas memiliki seperangkat pranata sosial yang menjadi basis ideologis bagi tindakan kolektif warganya untuk bekerja sama menyelenggarakan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.

Kajian tentang tata kelola sumberdaya kolektif merupakan isu-isu pengelolaan sumber daya komunitas yang telah lama menarik perhatian ilmuwan sosial seperti Garrett Hardin dalam Lubis (2002), dengan tesis kuncinya bahwa sumberdaya yang dikategorikan milik bersama seperti hutan belantara, lautan lepas, udara, danau, sungai dan sebagainya cenderung untuk dieksploitasi secara

berlebihan karena sumberdaya demikian tidak dimiliki oleh seorang pun. Karena itu tak ada seorangpun yang merasa bertanggungjawab untuk menjaga dan merawatnya. Itu sebabnya untuk menghindari eksploitasi secara massif dan tak terkontrol,

Hardin kemudian mengembangkan dua pola pengelolaan atas sumber daya milik bersama itu melalui privatisasi dan penguatan kontrol pemerintah. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa praktek eksploitasi melalui dua model pendekatan pengelolaan sumberdaya ini justru dilakukan secara berlebihan dan tak bertanggungjawab, seperti pemberian konsesi pengelolaan hutan melalui skema HPH. Demikian juga pengelolaan sumberdaya ekonomi seperti dana bantuan sosial seperti alokasi dana desa mandiri, JPS, Raskin dan fasilitas kredit lainnya sering kali tak luput dari pengelolaan yang baik. Berkaitan dengan itu Acheson dalam Lubis, (2002 : 65) menegaskan bahwa mekanisme pengaturan penggunaan sumberdaya milik bersama tidak hanya sebatas privatisasi dan penguatan terhadap aturan-aturan yang dikembangkan pada tingkat komunitas lokal saja. Karena fakta membenarkan bahwa di sejumlah komunitas pada level lokal masyarakatnya mampu mengembangkan institusi-institusi seperti *gemohing* dalam mengelola sejumlah aktivitas sosial masyarakat desa serta tata kelola sumber daya komunitas lain seperti tanah, hutan, air dan kebun larangan yang secara efektif mampu membatasi dan mengontrol tingkat eksploitasi sumberdaya secara berlebihan di beberapa komunitas negeri ini.

Selain itu menurut Pretty dan Ward dalam Lubis (2002:65) bahwa pengelolaan sumberdaya alam selalu menuntut orang untuk terlibat dalam bentuk tindakan kolektif. Suatu pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab serta

berkelanjutan senantiasa diindikasikan oleh adanya pola perilaku kerjasama komunitas yang berkepentingan dengan sumber daya itu. Menurut Amir (1999:62) bahwa secara teoritik kerjasama dalam bentuk tindakan kolektif harus didahului oleh adanya kepercayaan di antara seseorang dengan orang lain. Dan untuk menumbuhkan kerja sama guna melaksanakan tindakan kolektif itu tentunya memerlukan dukungan kepercayaan yang terbentuk dalam jangka waktu yang relatif lama melalui proses interaksi atau relasi social yang intens di antara mereka sebelumnya. Itu berarti adanya saling kepercayaan diantara mereka dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan kerja-kerja kolektif secara bertanggungjawab. Karena menurut Fukuyama (1995) sikap saling percaya antara seseorang dengan orang lain dalam suatu komunitas dalam kerangka membangun kerjasama merupakan elemen inti dari modal sosial.

Selanjutnya modal sosial menurut James Coleman dalam Lubis (2002) adalah aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Lebih lanjut dikatakan oleh Coleman dalam Soetomo (2008:89) bahwa human capital tidak terbatas berasal dari pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi juga berasal dari kemampuan bekerja sama dalam berbagai kelompok dan organisasi guna mencapai tujuan bersama yang kemudian disebut sebagai modal social.

Dalam kaitan dengan hal ini, Ostrom dalam Lubis (2002) mengemukakan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya Putman (1993) mencoba mengembangkan lebih luas konsep modal sosial dengan menegaskan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat sipil, yang mengacu pada aspek-aspek utama

dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma dan jaringan-jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi bagi tindakan yang terkordinasi. Sedangkan bagi Fukuyama, (2002) sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa modal sosial berintikan kepercayaan yang merupakan aspek budaya dari kehidupan ekonomi yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Lebih jauh dijelaskan oleh Fukuyama bahwa kepercayaan merupakan produk yang amat vital dari norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan modal sosial. Sebab itu apabila masyarakat mampu mengelola komitmen dan mengembangkan norma-norma sosial reciprocal yang saling menguntungkan, seperti saling memberi, saling menerima, saling meneguhkan dan saling membantu maka akan menjadi pintu masuk yang efektif bagi pencapaian tujuan-tujuan bersama yang lebih besar. Selain itu menurut Soetomo (2008:87) bahwa kepercayaan juga dapat mendorong seseorang bersedia menggunakan hasil kerja orang atau kelompok lain, bahkan kepercayaan juga akan mendorong tindakan bersama yang saling menguntungkan.

Menurut Pretty, Ward dan Putman dalam Lubis, (2002:67) bahwa kepercayaan merupakan unsur pelumas atau pelicin yang amat penting dalam membangun kerjasama dan kehidupan sosial. Putman (1999) pun menyebutkan bahwa ketersediaan modal sosial berupa kepercayaan, norma-norma, jaringan sosial cenderung menguat sendiri dan bersifat kumulatif, bukan seperti pada modal material yang bisa habis ketika digunakan secara terus menerus. Dengan kata lain modal sosial merupakan sumber daya moral yakni suatu sumber daya yang persediaannya tidak pernah habis bahkan bertambah melalui penggunaan

secara terus menerus tetapi kalau modal fisik penggunaan secara terus menerus akan mengakibatkan berkurang dan bahkan habis.

Dengan demikian menurut Soetomo, (2008:89-90) bahwa tindakan bersama yang saling menguntungkan yang terwujud dari keberadaan modal sosial tidak selalu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan ekonomi produktif, melainkan juga tindakan saling menguntungkan dari sudut sosial termasuk dalam mewujudkan tindakan bersama untuk kesejahteraan bersama. Tindakan bersama yang saling menguntungkan sesungguhnya merupakan wujud dari adanya kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, yang oleh Soetomo (2008:83) merupakan modal sosial dan energi sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Karena itu dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki masyarakat, setiap anggota komunitas dapat mengembangkan hubungan dan jaringan sosial yang lebih luas dan saling menguntungkan seperti merasa aman, merasa terlindungi, memperoleh jaminan sosial atau kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Dalam banyak kasus diketahui bahwa modal sosial ternyata dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan tindakan bersama guna membangun fasilitas publik dan pelayanan sosial yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh institusi *Gemohing* sebagai basis modal sosial bagi masyarakat desa di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur sebenarnya telah lama digunakan untuk membangun fasilitas publik desa, rumah penduduk serta peladangan masyarakat desa maupun mekanisme sosial budaya yang sangat dinamis mewarnai tumbuh kembangnya seluruh sendi-sendi kehidupan sosial warga desa.

Identifikasi Elemen Modal Sosial

1. Elaborasi sejumlah gagasan para ahli tentang konsep modal sosial di atas telah memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi sejumlah elemen penting yang menjadi inti dari modal sosial. Identifikasi elemen utama konsep modal sosial ini merujuk pada pandangan Rober D.Putman, (1999) sebagai dasar metodologis dalam menjelaskan *Gemohing* sebagai modal sosial, antara lain : kepercayaan yang berbasis pada : (a) adanya kejujuran di antara para pengurus dan anggota *gemohing* serta sistem pengelolaannya memberi jaminan rasa keadilan dan kejujuran bagi anggota, transparan dalam menggunakan / memanfaatkan hasil (b) kewajaran, yakni wajar menegakkan aturan main dan tidak pilih kasih dalam mengambil keputusan maupun pemberian sanksi sesuai dengan kesepakatan anggota, (c) sikap egaliter, yakni tidak membedakan kedudukan seseorang untuk dipilih menjadi pengurus, kedekatan pengurus dengan semua anggota dan warga masyarakat; (d) toleransi yakni memberikan pengecualian dan keringanan kepada pengurus atau anggota dalam aktivitas *gemohing* ketika terkena musibah sakit, sanak keluarga meninggal dunia atau urusan penting lain, seperti menghadiri ritual adat, pesta adat dan acara keagamaan ; (e) kemurahan hati, yakni mensikapi aktivitas dalam *gemohing* sebagai wadah pengabdian kepada *lewo tanah* / masyarakat, sukarela dalam memberikan tenaga, waktu dan materi sesuai kemampuan serta ada perasaan senang, bangga dan dihargai atas pengabdianya mengurus kepentingan bersama.
2. Jaringan Sosial, yakni ada satuan-satuan sosial yang saling berhubungan satu dengan lain yang bekerja menggalang partisipasi dan kerjasama antar

anggota *gemohing*, pemerintah desa maupun masyarakat lain, yang ditandai dengan adanya keterlibatan yang luas dan kerjasama yang intens (melalui cara saling membalas kebaikan atau sikap tolong menolong) di antara mereka untuk mensukseskan setiap kegiatan pembangunan, baik pembangunan prasarana dan sarana publik desa maupun kegiatan-kegiatan sosial budaya milik lainnya.

3. Pranata, yang mencakup nilai-nilai yang dimiliki bersama, seperti menilai penting sikap kebersamaan dalam menanggung masalah yang dihadapi warga dan anggota *gemohing*, menilai penting sikap adil dan jujur, kerja kolektif dan menilai penting ritual-ritual budaya. Pranata juga berkaitan dengan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial, seperti dilarang menikmati hasil kerja sendiri, dilarang mementingkan diri sendiri, dikucilkan dari pergaulan sosial ketika melanggar aturan yang disepakati, mendapat hukuman denda sesuai kesepakatan semua anggota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelangngan dan Keruntuhan Modal Sosial

Dalam rangka menjaga eksistensi *gemohing* sebagai modal sosial agar tetap fungsional dan berkelanjutan sehingga dapat bekerja efektif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa, maka setidaknya dibutuhkan beberapa faktor kunci yang dapat diadaptasikan dan dikembangkan dari pandangan Lubis, (2002: 72-78) berikut :

- (1) Kemampuan Membangun Konsensus

Kapasitas membangun konsensus di antara semua anggota komunitas atas pengelolaan sumber daya kolektif seperti sumber daya tanah, hutan, ladang maupun sumber daya sosial atau organisasi sosial lokal seperti *gemohing* dari perspektif modal sosial tentu akan sangat bermanfaat dalam membangun tindakan kolektif. Hal itu berarti konsensus yang akan dibangun hendaknya diarahkan pada penentuan mekanisme tentang bagaimana merumuskan pola perilaku bertindak, terkait tata cara bekerja, sanksi dan cara memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai bersama. Pengelolaan sumber daya seperti ini setidaknya akan memberi manfaat dan nilai tambah tersendiri bagi setiap orang yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif. Karena itu dibutuhkan kemampuan dan kesadaran bersama membangun konsensus sebagai prasyarat mempertahankan dan mengembangkan *gemohing* sebagai modal sosial yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar bagi kepentingan pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa.

(2) Kemampuan Merumus dan Menetapkan Tujuan

Implikasi dari kemampuan membangun konsensus adalah adanya kemampuan merumuskan dan menetapkan tujuan atas konsensus yang telah disepakati. Yakni suatu visi dan misi yang ingin diraih bersama melalui kesepakatan untuk bertindak bersama secara suka rela. Apabila suatu komunitas gagal menetapkan tujuan yang jelas untuk dicapai bersama, maka sumberdaya yang dimiliki tersebut sesungguhnya tidak bisa dikelola dan dikembangkan sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan bersama.

(3) Kemampuan membangun Jaringan Sosial

Jaringan yang utuh dan solid akan mendorong semangat warga komunitas untuk mengambil bagian secara aktif dan sukarela atas pengelolaan sumber daya kolektif. Jaringan yang kompak juga akan menumbuhkan rasa kecintaan dan memiliki serta mau bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaannya. Karena menurut Putman dalam Lubis, (2002: 77) bahwa pelibatan semua pihak dalam menetapkan suatu tindakan kolektif adalah bagian yang amat penting dari partisipasi warga komunitas. Dan apabila anggota komunitas memiliki perasaan mencintai dan memiliki yang kuat maka warga komunitas akan lebih mudah digerakkan untuk bekerja bersama dan berpartisipasi aktif secara sukarela untuk mensukseskan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Tetapi apabila sebaliknya maka kekayaan sosial yang disebut sebagai modal sosial itu tak akan bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk membangun sumber daya kolektif.

(4) Kemampuan Membangun Kepercayaan

Kepercayaan sebagaimana dikatakan oleh Pretty dan Ward (1999:7) bahwa menciptakan kewajiban sosial pada pihak yang diberi kepercayaan dalam konteks pengelolaan sumber daya kolektif akan berimplikasi pada munculnya suatu kewajiban sosial yang sama dalam diri semua anggota komunitas untuk menjaga kepercayaan tersebut. Membangun kepercayaan butuh waktu tetapi bisa juga dengan mudah runtuh dan hancur berkeping-keping kalau semua anggota komunitas tidak

saling menjaga kepercayaan antara satu dengan lainnya. Karena kepercayaan di antara anggota komunitas pengelola sumberdaya kolektif adalah di antara mereka terdapat kejujuran, kerja keras, tanggungjawab dan memiliki niat baik merupakan kekuatan perekat untuk merajut kebersamaan dalam kerja sama yang langgeng.

(5) Kemampuan menata Pranata Sosial

Menurut Ostrom dalam Lubis (2002:78) kemampuan suatu komunitas dalam menata pranata sosial merupakan prakondisi untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang tentu menjadi bukti adanya suatu kekuatan untuk membangun modal sosial masyarakat. Dengan demikian semua pranata yang sudah ada dalam mengatur pola perilaku dan tindakan bersama seharusnya dapat menjawab kebutuhan dan kesanggupan semua anggota komunitas. Selain itu kemampuan menata pranata juga dapat dilihat dari kesanggupan semua anggota komunitas mematuhi dan menjalankan hak dan kewajiban serta sanksi-sanksinya sesuai kepentingan dan tradisi komunitas. Dengan demikian penataan dan penegakkan semua aturan main harus bertumpu pada kesadaran dan suka rela yang tinggi dari semua anggota komunitas dalam melaksanakannya.

B. PEMBAHASAN

Konsep *Gemohing* dalam Pembangunan Masyarakat

Masyarakat desa di kabupaten Flores Timur umumnya dan kecamatan Witihama pada khususnya sudah lama mengenal tradisi kerjasama dan partisipasi yang berfungsi untuk mengelola seluruh sumber daya kolektif guna mewujudkan

kesejahteraan bersama. Konsep kerjasama itu kemudian diberi nama ”*gemohing*”. Istilah ini berasal dari kata bahasa Lamaholot, (bahasa daerah setempat) yaitu : *gemohe* yang berarti saling membantu atau bekerja bersama.

Pada mulanya *gemohing* hanya bergerak di bidang pertanian semata. Hal ini logis diterima karena inisiatif kerjasama, awal mulanya datang dari sekelompok petani yang mau bersama-sama secara gotong royong mengerjakan lahan pertaniannya. Lambat laun orientasi kegiatannya tidak saja di bidang pertanian, melainkan makin meluas jangkauannya ke bidang sosial lain. Karena itu konsep *gemohing*, mulai mengalami perluasan makna, yakni tidak hanya sebatas pada kegiatan gotong royong sekedar menekankan pada upaya bersama anggota komunitas dalam melakukan sebuah pekerjaan publik tertentu, melainkan hampir di semua aktifitas pembangunan masyarakat. Apabila *gemohing* dicermati dari perspektif modal sosial, maka sesungguhnya dalam *gemohing* pun terkandung beberapa elemen utama, antara lain : adanya kerjasama, partisipasi, saling membantu atau menolong dalam menghadapi masalah sosial. Elemen-elemen *gemohing* tersebut tumbuh dan berkembang secara alamiah melalui proses interaksi sosial dalam jangka waktu lama yang kemudian mendorong lahirnya saling percaya di antara anggota masyarakat untuk membangun jaringan dan pranata sosial atas dasar kebutuhan bersama dalam menghadapi berbagai peroblem sosialnya. Sebab itu *gemohing* kemudian dimaknai sebagai sebuah strategi pembangunan yang memosisikan masyarakat sebagai subyek dan obyek yang strategis dalam menggerakkan prakarsa, kreativitas, kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola segala aktivitas pembangunan serta aktivitas sosial budaya lain, seperti pelaksanaan ritual adat perkawinan dan

kematian serta dapat mengatur cara menikmati hasilnya bersama secara adil sesuai kontribusi yang diberikannya. Atau yang oleh Marx dalam Suseno, (2001), disebut sebagai produksi nilai lebih bersama dan dinikmatinya secara bersama secara adil. Itu berarti *gemohing* dapat dilihat sebagai aset atau kekayaan kolektif yang bernilai tinggi, karena dapat menjadi alat kontrol publik yang efektif atas sumber-sumber daya yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan elemen sosial lain setidaknya dapat menjadikan kekuatan lokal *gemohing* sebagai mitra kerja yang penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan masyarakat termasuk dalam menghadapi tantangan global secara bersama-sama.

Dewasa ini melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban baru manusia tengah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Akibatnya telah terjadi perubahan secara signifikan terhadap gaya hidup dan cara kerja masyarakat yang telah berimplikasi serius pada perubahan tatanan sosial dan ekonomi, serta kesadaran baru manusia yang tentunya dapat berakibat pada runtuhnya mekanisme pengelolaan sumber-sumber daya kolektif di desa. Dengan makin menjamurnya investasi berskala nasional maupun global di tingkat lokal, maka *gemohing* harus mampu menjalankan peran dan fungsi utamanya dan memastikan bahwa cara pandang dan cara kerja institusi lokal yang berorientasi sosial kolektif itu tidak ikut terkooptasi, melainkan harus dapat beradaptasi dan mengembangkan dirinya sesuai tuntutan perubahan masyarakat. Sehingga tradisi *gemohing* bisa lebih eksis menjalankan peran dan fungsi awalnya sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam mengelola kerjasama atas sumber-sumber daya kolektif masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian

institusi baru yang berskala nasional dan global yang terlibat secara langsung dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa setidaknya dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam wujud kerjasama dan partisipasi aktif dari pranata-pranata lokal sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan dan menguatkan kebersamaan, tanpa saling menggeser dan menghancurkan.

Mendeskripsikan *gemohing* dalam sudut pandang modal sosial, setidaknya dapat membantu kita memahami lebih dalam dan komprehensif wawasan pemikiran baru tentang pentingnya keberadaan *gemohing* dan ragamnya kekayaan sosial budaya yang dimiliki masyarakat di negeri ini. Karena itu semesta kekayaan sosial yang dimiliki ini, mestinya dijadikan sebagai kekuatan pendorong pembangunan guna mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Meskipun demikian dalam kenyataan semua kekayaan sosial itu dalam peran dan fungsinya sebagai alat pembangunan lebih sering dan cenderung terabaikan. Pada hal peran dan fungsi strategis modal sosial khas lokal itu seharusnya diposisikan sebagai mitra tangguh bagi penyelesaian masalah sosial dan pembangunan masyarakat desa.

Modal sosial khas masyarakat desa yang disebut dengan ”*gemohing*” dipandang penting karena memiliki sejumlah elemen pokok, antara lain : adanya kepercayaan dan jaringan sosial sebagai basis menggalang kebersamaan dan kerjasama dalam menghadapi berbagai masalah sosial yang ada di desa. Elemen-elemen *gemohing* sejatinya secara alamiah tumbuh dan berkembang seiring dengan terbentuknya kehidupan dan peradaban masyarakat itu sendiri, melalui kontak dan proses interaksi sosial dalam rentang waktu dan sejarah yang panjang. Sebab itu menurut hemat penulis *gemohing* dapat dimaknai sebagai sebuah

strategi komunitas dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan di level lokal. Dan secara demokratis *gemohing* telah memposisikan masyarakat dalam sebuah lembaga kerjasama sebagai subyek dan obyek pembangunan sekaligus.

Dengan demikian secara esensial *gemohing* sejatinya telah menjadi bagian dari kekuatan kolektif dan basis bagi tumbuh kembangnya prakarsa, kreativitas, kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat. Dan karena itu dapat dijadikan mitra pemerintah dalam seluruh tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Selain itu *gemohing* pun dapat memainkan peran sosial lain dalam peristiwa-peristiwa sosial budaya, seperti pelaksanaan ritual adat perkawinan dan kematian termasuk mengatur cara menikmati hasilnya bersama secara adil sesuai kontribusi yang diberikan. Kajian di lapangan yang berhubungan dengan sejumlah peran kunci *gemohing* sebagai modal sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepercayaan dan Jaringan Sosial dalam *Gemohing*

Kepercayaan dan jaringan sosial yang lahir dan berkembang dalam *gemohing* merupakan suatu proses panjang yang terbentuk sejak terjadi kontak dan interaksi sosial yang intens di antara warga masyarakat dalam hampir semua dimensi kehidupannya sejak lahir dan terbentuknya desa itu. Melalui interaksi sosial yang terus menerus dijalin antara satu dengan lain dalam setiap peristiwa kehidupan sosial sehari-hari telah membentuk apa yang disebut dengan kesadaran kolektif yang kuat untuk pembangunan. Dan setidaknya kehadiran *gemohing* sebagai modal sosial telah membangkitkan kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya memahami dan memaknai segala kebutuhan, masalah dan tantangan yang dihadapi menjadi tanggungjawab bersama untuk dipecahkan.

Dalam proses interaksi sosial yang terus berlangsung telah memberi penguatan pada hubungan sosial dan harmoni sosial yang kemudian membangkitkan rasa saling percaya dan pengertian yang kuat di antara mereka untuk membangun jaringan sosial bersama antara warga desa dalam segala aspek pembangunan. Kepercayaan dan jaringan sosial masyarakat yang terbentuk dari hasil proses interaksi sosial yang berlangsung dalam rentang waktu yang lama tersebut kemudian terpolakan atau terlembaga dalam apa yang disebut atau dikenal dengan nama “*Gemohing*”. Keberadaan *gemohing* sebagai kekuatan lokal yang tangguh pada hakikatnya telah membangkitkan dinamika kehidupan sosial baru yang menjadi ciri khas dan identitas komunal bagi masyarakat desa. Dalam *gemohing* inilah kemudian terbentuk satu perasaan identitas sosial yang berbasis pada kesamaan budaya, seperti kesamaan bahasa, asal usul, keturunan, suku, adat, pekerjaan dan penghasilan yang relatif sama.

Peran serta *gemohing* yang aktif dan makin meluas telah membentuk dan menghadirkan suatu kesetiaan sosial dan solidaritas kolektif baru yang sangat dominan dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah - masalah pembangunan di desa. Data empiris yang diperoleh sesungguhnya membuktikan bahwa dinamika demokrasi desa juga telah lama tumbuh dan berkembang serta dipraktikkan dalam setiap proses pengambilan keputusan di dalam *gemohing*. Misalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik seperti : sekolah, kantor/balai desa, jalan desa, tempat ibadah dan prasarana publik lain selalu diputuskan melalui forum musyawarah komunitas yang dihadiri oleh hampir semua elemen masyarakat yang terwadahi dalam *gemohing*. Karena itu bisa dimaklumi ketika menghadapi masalah pembangunan dalam

bentuk dan seberat apapun masyarakat desa selalu bisa dengan mudah mengatasinya melalui cara dan prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dan dianut dalam kehidupan masyarakatnya.

Kepercayaan yang terbentuk dan kemudian meluas pada jaringan sosial senantiasa teraktualisasi dalam wujud keterlibatan masyarakat yang aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Mekanisme kerja *gemohing* yang telah mentradisi tersebut setidaknya telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi warga desa untuk belajar menghargai sesama dan bertanggungjawab secara sukarela atas semua masalah, keberhasilan dan kegagalan pembangunan.

Bukti empiris lain juga menjelaskan bahwa pada dasarnya *gemohing* di masa lalu dilandasi oleh spirit kebersamaan dan soliditas yang sangat menonjol, sehingga setiap program pembangunan desa dalam bentuk apapun dapat dikerjakan dengan sangat sukses. Karena itu kehadiran *gemohing* di tengah kehidupan masyarakat selalu memberi warna, harapan dan manfaat yang positif bagi pembangunan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh adanya perasaan identitas dan rasa saling memiliki di antara mereka sebagai satu suku, adat, keturunan (satu nenek moyang), satu tradisi serta kesamaan asal usul masih melekat sangat kuat. Cikal bakal timbulnya *gemohing* dapat dipahami melalui ceritra rakyat ketika para pendiri desa / kampung mulai membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan tempat tinggal tetap.

Menurut ceritra, awal mula kerja sama sebenarnya dimulai dari pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan tempat tinggal. Pada waktu itu semua masyarakat selalu bersatu dan beramai-ramai bahu membahu bekerja sama

membuka hutan untuk dijadikan kebun dan rumah. Karena penduduk ketika itu masih sangat sedikit jumlahnya dan tanahpun masih sangat luas. Sebab itu siapapun dengan mudah bisa memperoleh tanah dari para tuan tanah dengan mudah dan cuma-cuma. Sedangkan sekarang ini tanah makin sulit diperoleh, karena tanah tidak pernah bertambah jumlahnya sementara jumlah penduduk makin bertambah dari tahun ke tahun, sehingga jika ingin memperoleh tanah untuk kebun dan rumah, setidaknya harus melalui proses pendekatan yang lebih bersifat transaksional atau jual beli. Kerjasama yang terbentuk sejak awal berdirinya desa itu kemudian berlanjut dan diperkuat oleh ikatan kelompok suku-suku (*gemohing*) yang ada di desa untuk mengerjakan lahan pertanian, perumahan maupun dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana publik desa.

Hal itu dimaksudkan agar proses mobilisasi dukungan tenaga kerja dalam membangun semangat kerjasama bisa lebih optimal pada setiap pelaksanaan pembangunan. Namun aktivitas yang dilakukan oleh *gemohing* bukan semata-mata karena mengikuti suatu perintah melainkan didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Selain itu karena memang masyarakat beranggapan bahwa mereka adalah satu turunan, satu nasib dan satu perjuangan dalam perjalanan hidup dengan segala kebutuhan, harapan, tantangan dan masalah yang harus dipecahkan secara bersama di saat itu. Kearifan para leluhur dari warga masyarakat desa dalam mengelola kehidupan sosial, menjaga hutan konservasi untuk pelestarian sumber daya alam, hewan dan segala isinya maupun lahan pertanian penduduk dan tempat tinggal tetap telah diatur berdasarkan kewenangan tradisional yang dimiliki oleh masing-masing suku pendahulu

yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai tanah suku atau tanah ulayat. Prinsip dasar pengelolaan tanah ulayat senantiasa berbasis pada nilai - nilai demokrasi lokal yakni tanah ulayat merupakan milik kolektif atau komunitas yang dikerjakan secara bersama-sama untuk kesejahteraan komunitas.

Karena itu tanah ulayat menurut sejumlah tokoh adat desa di kecamatan Witihama, sejatinya tidak boleh dialih fungsikan menjadi milik pribadi dan diperjual belikan atau digantikan hak kepemilikan atas nama suku atau nama orang lain di luar suku. Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa berbasis kebersamaan yang dijiwai oleh perasaan saling percaya yang kemudian diperluas melalui jaringan sosial, tampaknya mulai mengalami kemerosotan yang sangat mengkhawatirkan karena telah menggoyahkan dan meruntuhkan sendi-sendi kebersamaan yang teraktualisasi melalui rendahnya semangat gotong royong dan swadaya masyarakat desa. Hal itu terjadi sebagai implikasi dari hadirnya program-program pembangunan yang dibuat dan diproyekkan oleh negara pada masa rezim orde baru berkuasa dengan menyediakan upah murah bagi setiap tenaga kerja dari warga desa setempat yang ikut terlibat dalam program dan proyek-proyek pembangunan desa. Dalam rangka mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa, di desa pun telah dibentuk sejumlah pranata-pranata baru, seperti : LMD/BPD, LKM/LPMD, Karang Taruna, KUD, PKK, KUBe, yang sebenarnya telah menggeser bahkan melumpuhkan sama sekali peran kunci dari *gemohing* itu sendiri sebagai modal sosial masyarakat desa yang sebelumnya menjadi kekuatan utama penggerak roda pembangunan desa. Masyarakat desa yang sejak dulu kala terlibat tanpa upah dalam seluruh proses kerjasama

pembangunan karena merasa memiliki bersama, sehingga mau bertanggung jawab atas semua tantangan dan masalah pembangunan di desa.

Dewasa ini nilai-nilai sosial budaya seperti yang diuraikan tersebut mulai mengalami disorientasi yang sangat serius karena sumberdaya (materi) dan tenaga masyarakat tidak hanya dipandang sebagai modal sosial melainkan telah berubah menjadi modal ekonomi. Sebab itu seluruh tenaga, materi dan waktu yang dikeluarkan dalam pembangunan desa tidak semata dilihat sebagai modal sosial tetapi juga dinilai atau dihargai dengan uang. Karena itu pengembangan usaha dan kreativitas yang sering dilakukan senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai baru yang diperoleh dari luar, tanpa memperdulikan kepentingan lingkungan sosial, sehingga intensitas untuk berkumpul bersama orang-orang lain atau sesama warga seperti dulu mulai berkurang.

Fenomena seperti ini menurut penulis setidaknya bersumber dan dipicu oleh perubahan status sosial masyarakat akibat perbedaan pekerjaan, pendidikan dan pendapatan. Selain perubahan status sosial, juga karena ada perubahan cara pandang baru di masyarakat yang memperlihatkan semangat untuk memupuk modal ekonomi secara berlebihan yang bertumpu pada kemandirian individual. Ada semacam kebanggaan atau prestasi sosial tersendiri ketika setiap problem kehidupan yang dihadapi dapat dipecahkan dengan kemampuan ekonomi sendiri tanpa bantuan sesama atau bantuan lingkungan sosialnya. Hal itu memang dimungkinkan berubah sebagai konsekuensi dari kemajuan pembangunan dewasa ini yang cenderung berwatak kapitalis. Pembangunan yang berwatak kapitalis telah merubah wawasan berpikir masyarakat desa tentang orientasi di masa

depan yang hanya bisa diraih dengan adanya akumulasi kapital secara terus menerus.

Merosotnya semangat kebersamaan dalam berbagai aktivitas pembangunan desa juga menjadi kian serius dirasakan oleh masyarakat, tat kala sejumlah program dan kegiatan pembangunan desa dibiayai oleh negara dengan menyertakan warga masyarakat sebagai tenaga kerja upahan. Upah bagi sebagian masyarakat desa sudah dianggapnya sebagai balas jasa atas keterlibatan warga desa dalam pembangunan sehingga hal itu bagi sebagian masyarakat dianggap wajar dan harus diperoleh. Oleh sebab itu ketika seseorang telah menyumbangkan tenaga atau sejumlah material tertentu bagi pembangunan maka ia akan berharap mendapat imbalan atas keterlibatannya itu.

Keadaan yang demikian setidaknya telah berimplikasi pada perubahan perbaikan penghasilan, pendidikan dan pekerjaan yang makin bervariasi bagi sejumlah warga masyarakat desa. Sebagai contoh untuk mengerjakan lahan pertanian, seorang petani tidak harus bergabung dalam *gemohing* atau mengerjakannya secara bersama-sama, melainkan ia dapat menyewa *gemohing* atau sejumlah orang yang ada di desanya atau di desa lain untuk mengerjakannya. Pada hal *gemohing* di masa lalu tidak bisa tergantikan apalgi disewakan dengan uang oleh siapapun sehingga mau dan tidak mau setiap orang harus dapat terlibat secara langsung dalam kerjasama (*gemohing*) agar lahan pertanian dan pembangunan rumah, atau fasilitas publik lain bisa teratasi melalui kerja kolektif itu. Pada titik ini sebenarnya masyarakat desa secara tidak langsung sedang dididik untuk meninggalkan kebiasaan lama yang sarat dengan nilai-nilai sosial tinggi yang justru menjadi kekuatan kolektif.

Dengan demikian secara sistemik kebijakan negara memproyeksikan semua proses pembangunan di desa apapun alasannya sebenarnya telah menjadi sebab lumpuhnya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dalam mengatasi dan memenuhi kepentingan bersama untuk menyukseskan pembangunan desa. Akibatnya partisipasi masyarakat menjadi sangat minimalis atau terbatas pada sejumlah orang tertentu yang memiliki kesadaran tinggi tentang makna pembangunan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk melaksanakan program tersebut. Dan karena itu keputusan yang diambilpun tidak selalu relevan dengan problem dan kepentingan masyarakat, bahkan terkadang tak membawa manfaat yang signifikan bagi semua warga desa.

Meskipun demikian ada beberapa *gemohing* yang masih memperlihatkan karakter dan fungsi dasarnya sebagai modal sosial karena aktivitas *gemohing* tersebut masih menonjolkan spirit kebersamaan dan kerjasama yang kuat dalam melaksanakan pembangunan dan aktivitas sosial lain di masyarakat. Nilai-nilai sosial khas masyarakat desa seperti saling percaya, saling membantu dan tolong menolong yang kemudian secara tak sadar telah membentuk dan menghasilkan jaringan sosial yang makin luas ditunjukkan melalui kebersamaan dalam pembangunan. Dan ternyata dalam hal-hal tertentu belum pupus dari peradaban masyarakat desa. Itu sebabnya nilai-nilai kebersamaan yang berbasis komunitas dan budaya dengan dilatarbelakangi oleh rasa persaudaran dan kekerabatan masih memberi warna tersendiri bagi *gemohing* dan justru menjadi tali pengikat atau perekat bagi kebersamaan untuk mendorong suksesnya kerja-kerja kolektif lain di desa. Walaupun sebagian besar masyarakat tidak lagi terlibat dalam *gemohing* namun kebersamaan dan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan sosial tertentu seperti

pada peristiwa kematian, perkawinan maupun dalam menghadapi musibah, seperti bencana alam dan konflik sosial juga masih tetap kuat tertanam dalam diri setiap warga masyarakat. Spontanitas dalam merespon berbagai pembangunan dan peristiwa-peristiwa sosial yang disebut di atas memang terasa masih kuat karena masyarakat pada umumnya tetap menjadikan tradisi adat sebagai pegangan hidup dalam membangun kehidupan sosial melalui ikatan kekerabatan dan perkawinan di antara mereka.

Dengan demikian pemerintah desa seharusnya melihat *gemohing* sebagai bagian dan entitas yang tak terpisahkan dari seluruh proses pembangunan. Itu berarti *gemohing* bisa diberi fungsi yang lebih substantif dalam tata kelola pembangunan, mengingat masyarakat desa secara kolektif masih memiliki kesadaran tinggi untuk selalu bersama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa sosial desa sebagaimana dijelaskan di atas. Melalui momentum seperti inilah pemerintah desa seharusnya dapat mengarahkan masyarakat dalam mendukung kepentingan pembangunan yang lebih luas terutama untuk menghadapi pelaksanaan pembangunan desa. Dan masyarakat desa harus diberi pemikiran dan wawasan baru tentang pentingnya merajut kebersamaan dalam menghadapi segala problem sosial dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Itu berarti kebersamaan masyarakat seharusnya tidak hanya diwujudkan dalam menghadapi peristiwa perkawinan dan kematian semata, melainkan juga diarahkan sedemikian rupa untuk mendukung program-program pembangunan desa dalam suasana kebersamaan. Karena dalam kenyataan masyarakat mulai kehilangan semangat membangun dan menghadapi masalah bersama, sehingga partisipasi masyarakat yang diharapkan tumbuh atas dasar kesadaran kolektif tidak terwujud. Bahkan

yang terjadi kemudian adalah semangat transaksional berbasis untung dan rugi. Sisi menarik lain dari tradisi *gemohing* adalah, masyarakat yang terikat dalam *gemohing* selalu mengakhiri setiap kegiatan bersama melalui makan bersama. Makan bersama sesungguhnya merupakan wujud tertinggi dari kebersamaan itu. Karena kebersamaan yang diwujudkan melalui makan bersama setidaknya dapat dilihat sebagai sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada sang pemberi hidup (*rera wulan tana ekan*) bagi setiap orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan sekaligus dipandang sebagai sebuah mekanisme jaring pengaman sosial orang desa untuk memenuhi kebutuhan akan makanan yang bernilai nutrisi. Sebab tidak banyak warga desa yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dari aspek pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengkomsumsi makanan bergizi setiap hari.

Oleh sebab itu setiap peristiwa dalam kerja-kerja kolektif yang diakhiri melalui makan bersama menjadi momentum yang amat berharga untuk mempertegas dan memperteguh kembali semangat kebersamaan itu. Dengan demikian spirit membangkitkan kembali kejayaan *gemohing* di masa lalu sesuai konteks kekinian sebagai modal sosial bagi pembangunan desa sejatinya masih menjanjikan harapan agar dihadirkan kembali dalam pentas pembangunan masyarakat desa. Harapan itu mestinya terwujud apabila pemerintah di semua tingkatan mau membuka ruang kerjasama dan dialog dalam rangka membagi peran dan tanggungjawab yang memadai dalam pembangunan kepada *gemohing* sebagai mitra tangguh yang efektif.

2. Tindakan Kolektif : melalui Kerjasama dalam *Gemohing*

Mewujudkan tindakan kolektif dalam kerjasama komunitas melalui kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat sejatinya bermula dari adanya kepercayaan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Karena itu menurut banyak ahli kepercayaan merupakan aspek pelumas atau pelicin dalam membangun kehidupan sosial seperti kerja sama dan tindakan kolektif warga desa dalam *gemohing*.

Kajian empiris membuktikan bahwa sejumlah warga desa yang menjadi bagian dari entitas *gemohing* mampu mewujudkan tindakan kolektif melalui kerjasama, seperti bergotong royong dan berswadaya dalam pembangunan prasarana-prasarana publik desa maupun dalam menghadapi peristiwa-peristiwa sosial, semisal kematian dan perkawinan yang senantiasa dilandasi oleh adanya saling percaya, saling pengertian di antara satu dengan lainnya. Hal itu disebabkan oleh keyakinan dari masyarakat tentang adanya komitmen, integritas dan kejujuran yang tinggi dari semua orang yang terlibat dalam *gemohing*.

Sikap saling percaya di antara mereka telah membangkitkan tindakan kolektif dan melahirkan kerjasama yang lebih luas karena terpolanya norma-norma saling ketergantungan atau saling tolong menolong untuk melakukan tindakan bersama dalam membangun kehidupan sosial. Sebab itu kepercayaan sebagai modal sosial guna mendorong tindakan kolektif melalui kerjasama cenderung menguat sendiri dan bertambah banyak seiring dengan makin intensnya keterlibatan warga dalam kerja-kerja kolektif itu. *Gemohing* sebagai kekuatan komunal tampaknya lebih mudah diorganisir dan digerakkan untuk mengaktualisasikan tindakan bersama dalam berbagai bentuk kegiatan

pembangunan, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota *gemohing* secara individual maupun kolektif.

Bentuk tindakan kolektif masyarakat desa dalam sejumlah kegiatan pembangunan desa dewasa ini setidaknya mulai mengalami pergeseran nilai terutama tercermin pada program-program pembangunan bentukan negara. Tetapi apabila dicermati dari aspek sosial budaya, tampaknya kebersamaan dalam membangun kerjasama masih amat kuat. Karena secara sadar atau tidak, ikatan suku dan asal usul masih menjadi kekuatan pengikat tali kebersamaan di antara mereka. Akan tetapi bentuk-bentuk tindakan sosial masyarakat desa seharusnya lebih diorientasikan pada aspek-aspek pembangunan publik desa, bukan hanya pada aspek-aspek sosial budaya semata, seperti yang terjadi belakangan ini. Sebab masyarakat desa mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang kuat bahwa masalah apapun yang dihadapi akan bisa terpecahkan karena akan ada sanak saudara dan kerabat yang terlibat secara sukarela dalam peristiwa itu sebagai wujud tanggung jawab sosial. Itu berarti keterlibatan bersama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih kompleks dan luas dapat dilakukan, manakala ada stimulus sosial secara tepat melalui pendekatan kultural kepada tokoh-tokoh kunci yang ada di desa. Pendekatan kultural dapat dijadikan sebagai alat dan mekanisme yang efektif dalam membangkitkan kembali kesadaran kolektif tentang arti dan manfaat kehadiran seseorang bagi pembangunan untuk kepentingan bersama. Kesadaran kolektif bagi warga desa dalam *gemohing* di desa memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakatnya. Dan sejatinya kesadaran itu timbul karena telah terbangun dan terbentuknya perasaan saling percaya dan rasa solidaritas yang intim sejak lama

dalam kerangka menjaga kebersamaan dan hubungan sosial yang harmonis sebagai anggota komunitas.

Karena itu masing-masing orang selalu percaya bahwa apa yang disumbangkan atau diberikan berupa tenaga, waktu maupun materi / barang secara sukarela dalam bentuk apapun kepada sesamanya itu pada suatu ketika nanti pemberiannya akan kembali sebagaimana yang ia telah berikan kepada orang lain. Atau dengan kata lain setiap orang merasa ada kewajiban secara moral dan sosial, karena ia percaya bahwa setiap pemberian atau pertukaran akan dibalas kembali dengan hal yang sama. Jadi sikap saling balas membalas atau saling tolong menolong (resiprositas) dalam setiap peristiwa kehidupan sosial tampaknya masih menonjol dalam masyarakat yang teraktualisasi dalam apa yang disebut dengan *gemohing*.

Kerjasama dalam aspek yang lain pun masih sangat kuat dan terasa di desa seperti terlihat pada peristiwa perkawinan dan kematian, karena sudah menjadi tanggung jawab sosial dan tradisi masyarakat, sehingga biasanya masyarakat secara spontanitas akan terlibat memberikan kontribusi sesuai kemampuannya agar prosesi upacara perkawinan dan kematian bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam peristiwa seperti ini masyarakat tidak pernah dimobilisasi oleh siapapun dan oleh kekuatan manapun dari luar, melainkan hanya oleh kekuatan dari dalam diri sendiri karena ada kesadaran kolektif dan motivasi intrisik yang kuat dalam diri sendiri untuk hadir pada acara tersebut. Kehadirannya secara substansial telah memberikan manfaat bagi suksesnya pembangunan dan sekaligus menjaga kualitas hubungan kekerabatan di antara mereka agar tetap harmonis dan awet sebagai warisan budaya leluhur.

C. PENUTUP

Simpulan

1. Memelihara dan merawat kekhasan kolektif lokal seperti *Gemohing* sebagai modal sosial dalam berbagai dimensinya merupakan energi sosial komunal yang bermanfaat bagi pembangunan di level akar rumput yang sejatinya merupakan suatu strategi kebudayaan masyarakat desa yang tepat untuk menegaskan identitas masyarakatnya yang unik dan homogen. Dengan demikian *gemohing* dapat dilihat sebagai wujud memelihara kohesi sosial dalam mendukung pembangunan desa sekaligus sebagai kekuatan kolektif untuk menangkal eksese atau bias negatif dari arus kuat globalisasi dan modernisasi.
2. Kepercayaan dan Jaringan Sosial yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam *gemohing* sebagai modal sosial merupakan suatu episode kehidupan masyarakat komunal yang terbentuk melalui proses interaksi sosial yang intens dan mengakar dalam rentang sejarah panjang, telah menghasilkan apa yang disebut dengan kesadaran kolektif yang andal bagi berlangsungnya kerja-kerja sosial dan pembangunan di desa. Atau dengan kata lain kehadiran *gemohing* setidaknya telah membangkitkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam memahami dan memaknai urgensi tanggungjawab bersama terhadap kebutuhan, masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama.
3. Tindakan kolektif melalui kerjasama lewat *gemohing* adalah wujud nyata dari kebersamaan komunal yang sesungguhnya bermula dari adanya interaksi sosial yang kemudian menghasilkan kepercayaan dan

jaringan sosial yang telah dibangun dalam jangka waktu lama. Karena itu menurut banyak ahli kepercayaan merupakan aspek pelumas atau pelicin dalam membangun tindakan kolektif warga desa dalam bekerjasama. Analisis empiris membuktikan bahwa *gemohing* mampu membangkitkan tindakan kolektif yang terwujud melalui spirit kerjasama yang kuat dari warga masyarakat di bidang pertanian, perumahan warga maupun dalam merespon sejumlah program pembangunan desa seperti pembangunan prasarana-prasarana publik desa serta dalam menghadapi peristiwa-peristiwa sosial, semisal kematian dan perkawinan atas dasar saling percaya, saling pengertian serta link yang terbentuk di antara satu dengan lainnya. Sikap saling percaya dalam interaksi sosial tentunya telah melahirkan tindakan kolektif berupa gotong royong dan swadaya masyarakat.

4. *Gemohing* dalam konteks modal sosial, secara sosial psikologis setidaknya mampu meningkatkan kesadaran kritis banyak pihak tentang urgensi merawat dan melestarikan nilai-nilai lokal sebagai kekuatan penopang peradaban dan sekaligus membangkitkan kerinduan masyarakat yang telah kehilangan akar atau nilai-nilai budayanya akibat tergerus oleh nilai globalisasi.

Saran

Dalam rangka memperkuat dan menggerakkan partisipasi warga desa melalui kerja-kerja kolektif dalam mendukung seluruh proses pembangunan di desa, maka dapat diajukan beberapa pokok pikiran sebagai rekomendasi :

1. *Gemohing* sebagai modal sosial warga desa sesungguhnya dapat memainkan peran kuncinya sebagai mitra tangguh yang efektif bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa, dengan cara memberikan peran dan fungsi yang lebih substantif dan luas dalam seluruh proses pembangunan desa.
2. Kemitraan yang dibangun oleh pemerintah desa dengan *gemohing* haruslah bersinergi untuk mereproduksi kekuatan baru yang lebih andal dalam menjawab tantangan, masalah dan kebutuhan yang dihadapi mestinya tetap berbasis pada komitmen dan tanggungjawab bersama sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban masing-masing.
3. Kekayaan sosial budaya yang terkait dengan modal sosial masyarakat berupa kebersamaan dalam spirit gotong royong dan swadaya dengan segala mekanismenya mendukung pembangunan dan peristiwa sosial budaya haruslah tetap dipelihara, dirawat dan dipertahankan sesuai konteks kekinian sebagai pilar budaya dan penjaga peradaban tanpa mengabaikan dan mengurangi nilai kulturalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption : Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, Edisi terjemahan, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002
- _____ Trust, *The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York, The Free Press, 1995.
- Giddens, Anthony, *Jalan ketiga demokrasi sosial*, terjemahan Ketut Arya, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004
- Lubis Zuljifli, *Repong Damar , kajian tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Lahan Hutan di daerah Pesisir Krui Lampung Barat*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Tahun 1996.
- Kajian tentang *Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara* : dimuat dalam *Jurnal Dinamika Masyarakat*, 2002..
- Moleong, Lexy J, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja, Jakarta, 1997
- Pretty, Jules and Hugh Ward, *Social Capital and the Environment paper submitted to World Bank*, 1999.
- Putnam, Robert D, *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*, Priceton, 1993
- Soetomo, *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Singarimbun, Masri, ed, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran karl Marx, dari sosialisme utopis ke perselisihan Revisionisme*, Gramedia, Jakarta, 2001